



LAMPUNG SAI

MEI 2021 EDISI 5



TOPIK UTAMA

- Serah Terima Jabatan Sekaligus Pelepasan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
- Gerak Cepat Kanwil Lampung Tangani Covid-19 di Lapas dan Rutan

LIPUTANKHUSUS

- Serah Terima Jabatan Sekaligus Pelepasan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
- Kanwil Lampung Gelar Promosi dan Diseminasi KI dengan Tema “Diseminasi Kekayaan Intelektual Guna Mendorong Ekonomi Kreatif di Wilayah Lampung”



5 PESAN MENKUMHAM

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.



- 1 **Utamakan Akuntabilitas
kedepankan Integritas**
- 2 **Bangun Sinergitas serta
manajemen organisasi
yang sehat dan cerdas**
- 3 **Jabatan adalah amanah,
terima dengan tanggung-
jawab dan tinggalkan
jejak yang baik**
- 4 **Kuasai pengelolaan dan
penggunaan anggaran
sesuai prinsip akunta-
bilitas dan transparansi**
- 5 **Perkuat sinergi dan
kolaborasi internal serta
bangun kerjasama tim
yang baik**



icare

e|gov

REFORMASI
HUKUM

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA

BYWAYS THE BEST



Sambutan Kakanwil



Assalamualaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Tabik pun...

Puji dan syukur marilah kita senantiasa sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bekerja dan berkontribusi untuk negara. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan saya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, setelah menjabat 11 bulan 28 hari.

Dengan segala kerendahan hati saya mohon diri, dan disertai ucapan terima kasih yang tulus, atas segala perhatian, bantuan, dukungan dan kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Sebagai manusia biasa, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kekhilafan dan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Selanjutnya mohon doa semoga saya dapat menjalani masa purna tugas dengan baik untuk mengabdikan kepada keluarga dan masyarakat. Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua

Akhir kata Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Wr. Wb.



 **DANAN PURNOMO**
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM LAMPUNG

PELINDUNG

Kepala Kantor Wilayah
DANAN PURNOMO

PENGARAH

Kepala Divisi Administrasi
IDA ASEP SOMARA

Kepala Divisi Yankum dan HAM
NUR ICHWAN

Kepala Divisi Keimigrasian
HASANUDIN

Kepala Divisi Pemasarakatan
FARID JUNAEDI

PENANGGUNGJAWAB

Kepala Bagian Program dan Humas
BASNAMARA

PEMIMPIN REDAKSI

Kasubag Humas RB & TI
ARLISA NOVIRIANTONO

EDITOR

ARLISA NOVIRIANTONO, DAMBA WIRATAMA, REZA KHAIRUL FITRA, PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA WARDHANI, NABIL AN NAFIS

FOTOGRAFER, REDAKSI DAN BERITA

ARLISA NOVIRIANTONO, DAMBA WIRATAMA, REZA KHAIRUL FITRA, PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA WARDHANI, NABIL AN NAFIS

LAYOUT & DESAIN GRAFIS

NABIL AN NAFIS

Dari Redaksi



Assalamualaikum Wr. Wb

Tabik pun...

Kami segenap redaksi E-Buletin Lampung Sai Menyampaikan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan sehingga kami dapat menerbitkan E-Buletin Lampung Sai edisi ke-5 ini dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah, Pejabat Tinggi Pratama dan semua pihak yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta terus-menerus melakukan inovasi dan pembaharuan. Pada edisi E-Buletin yang ke-5 ini, kami telah merangkul kegiatan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dan Unit Pelaksana Teknis selama satu bulan terakhir. Khusus dalam edisi ini, kami menyajikan liputan mengenai Serah Terima Jabatan Sekaligus Pelepasan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Ada juga liputan Promosi dan Diseminasi KI dengan Tema "Diseminasi Kekayaan Intelektual Guna Mendorong Ekonomi Kreatif di Wilayah Lampung" yang dibuka langsung oleh Dirjen Kekayaan Intelektual, Freddy Haris.

Kami segenap redaksi mohon maaf apabila terdapat kesalahan tulisan. Semangat pembaharuan akan selalu mengiringi langkah tim redaksi untuk terus melakukan inovasi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan agar E-Buletin Lampung Sai lebih baik lagi. Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!

Tim Redaksi.





07

Serah Terima Jabatan Sekaligus Pelepasan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung



09

Kanwil Lampung Gelar Promosi dan Diseminasi KI dengan Tema "Diseminasi Kekayaan Intelektual Guna Mendorong Ekonomi Kreatif di Wilayah Lampung"



12



Kanwil Lampung Gelar Optimalisasi Peran Pokmas Lipas Serta Peningkatan Kompetensi Petugas Pemasyarakatan Tahun 2021

14



Gerak Cepat Kanwil Lampung Tangani Covid-19 di Lapas dan Rutan

SAYA SUDAH

DIVAKSINASI

Sukseskan Vaksinasi

TERAPKAN

3M (MUKA JARAK - MEKUTUKAN)

126 Pegawai Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

18



Kanwil Lampung Ikuti
Pembukaan Konferensi
Ilmiah Internasional
Hukum dan Hak Asasi

20



Kanwil Lampung
Serahkan Sertifikat Merek
Kepada Dekranasda

22



Kanwil Lampung Ikuti
Bimtek Pelaksanaan
Pelaporan Aksi HAM

23



Hadir Lengkap, Kanwil
Lampung ikuti Apel Pagi
Serentak di Lingkungan
Kemenkumham RI

30



Kakanwil Lantik 7 Pejabat
Administrasi dan 7
Kenaikan Jenjang Jabatan
Fungsional Perancang
Perundang-undangan
Muda

29



Kanwil Lampung Gelar
Evaluasi Kegiatan Divisi
Pelayanan Hukum dan
HAM

27



Pasca Lebaran, Kanwil
Lampung Ikuti Apel Pagi
Bersama Menteri Hukum
dan HAM RI

25



Kakanwil dan Bupati
Lampung Tengah Jadi
Saksi Penandatanganan
PKS di Lapas Gunung
Sugih

32



Kanwil Kemenkumham
Lampung Laksanakan
Pembinaan Desa Sadar
Hukum di Kabupaten
Lampung Timur

33



Kanwil Lampung Gelar
Pembinaan Kadarkum
Kabupaten Lampung
Tengah

34



Kanwil Lampung Turut
Berpartisipasi Pelopori
Pembentukan Pedoman
Pengelolaan Media
Sosial di Lingkungan
Kemenkumham RI

36



Kanwil Lampung Berikan
Diseminasi Layanan AHU
Mengenai Pelaporan
Pemilik Manfaat
(Beneficial Ownership)
Oleh Korporasi



Serah Terima Jabatan Sekaligus Pelepasan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Dalam rangka Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung yang digelar di Aula Kantor Wilayah Lampung serta melalui virtual zoom meeting, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Danan Purnomo yang memasuki masa Purna Bhakti secara resmi digantikan oleh Ida Asep Somara sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Senin (31/05/2021)

Kegiatan yang dihadiri secara virtual oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho sebagai saksi dan disaksikan oleh ASN pada Kantor Wilayah Lampung melalui kanal youtube kumhamlampung. Kegiatan ini juga turut mengundang Para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Jaringan Kantor Wilayah Lampung.

Acara dilaksanakan secara khidmat dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Penyerahan memori Serah Terima Jabatan dari Danan Purnomo kepada Ida Asep Somara serta disaksikan secara Virtual oleh Nugroho. Dalam sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indo-

nesia yang dalam hal ini disampaikan oleh Nugroho, mengingatkan kepada Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Lampung untuk memperhatikan dan senantiasa menjaga integritas dan mampu menjadi role model di lingkungan Kantor Wilayah Lampung, segera lakukan konsolidasi dengan jajaran untuk merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan sehingga berimplikasi kepada kualitas pelayanan publik sekaligus merealisasikan anggaran secara efektif, dalam komitmen membangun zona integritas semangat WBK dan WBBM dapat terus terinternalisasi kepada seluruh ASN di Lingkungan Kanwil Lampung, semangat membangun jaringan kepada para stakeholder dengan meningkatkan komunikasi yang



Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho



Berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh kepada Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho

efektif dan kuatkan peran sebagai negosiator sehingga akan mempermudah dalam pembangunan Bidang Hukum dan HAM di Lingkungan Kanwil Lampung.



“Lanjutkan program yang sudah ada, khusus jajaran masyarakatan untuk mengikuti intruksi pimpinan khususnya dalam penanganan narkoba dan lakukan langkah-langkah strategis dengan meningkatkan koordinasi dan membuat terobosan baru untuk meminalisir interaksi antara WBP dengan pegawai, terakhir tantangan tugas dan fungsi semakin besar maka ciptakan inovasi dalam bekerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”, Ujar Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi



Foto bersama dengan seluruh Kepala Satuan Kerja



Pelepasan Kakanwil dengan pedang pora oleh para taruna Poltekip

Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Guna Mendorong Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

HOTEL NOVOTEL BANDAR LAMPUNG, 27 MEI 2021



Kanwil Lampung Gelar Promosi dan Diseminasi KI dengan Tema “Diseminasi Kekayaan Intelektual Guna Mendorong Ekonomi Kreatif di Wilayah Lampung”

Kamis (27/05/2021) Bertempat di Ballroom Hotel Novotel Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menggelar Kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Tahun 2021 mengusung Tema “Diseminasi Kekayaan Intelektual Guna Mendorong Ekonomi Kreatif di Wilayah Lampung”.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Freddy Harris selaku Keynote Speaker dalam acara ini serta 3 (tiga) Narasumber lainnya yaitu Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Ditjen KI Kemenkumham RI, Daulat P Silitonga, Kepala Seksi Pengembang Segmen Pasar Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Indra Jamal Nur, dan Ketua Sentra KI LPPM Universitas Lampung, Meizano Ardhi Muhammad.

Sedangkan Para peserta sendiri berasal dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dan Kota

Bandar Lampung, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, Dekranasda Provinsi Lampung, Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Universitas Tulang Bawang, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Metro, Institut Teknologi Sumatera, dan Universitas Saburai, dan Pelaku Usaha dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).



Acara dimulai dengan pemaparan dari narasumber pertama, Daulat P Silitonga yang menjelaskan terkait dengan Kekayaan Intelektual Komunal dimana Kekayaan Intelektual sendiri terbagi menjadi Kepemilikan Personal dan Kepemilikan Komunal. Kekayaan Intelektual Kepemilikan Komunal seperti Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis.

Selanjutnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Lampung, Nur Ichwan menyampaikan Laporan Kegiatan. Dilanjutkan dengan Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo memberikan sambutan. Danan menjelaskan bahwa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa melalui ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dan mendukung peningkatan kesejahteraan



Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Lampung, Nur Ichwan menyampaikan Laporan Kegiatan



Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Freddy Harris menjadi Keynote Speaker

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Freddy Harris mengingatkan untuk selalu memberikan pelayanan yang nyata dengan ketulusan dan integritas.

masyarakat dan transisi Indonesia menjadi Negara Maju, perlu komitmen bersama dari berbagai pihak mulai dari membangkitkan semangat masyarakat untuk berkreasi, mendorong para pelaku usaha/UMKM untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas inovasi dan karya yang dimiliki hingga melindungi hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar.

Acara secara resmi dibuka oleh Freddy Harris serta penyerahan Sertifikat Merek kepada pelaku UMKM. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual mengingatkan untuk selalu memberikan pelayanan



Di era digital saat ini kita semua dituntut untuk selalu berinovasi dan berlomba mengikuti perkembangan zaman dalam memberikan pelayanan publik berbasis online, ujar Freddy

yang nyata dengan ketulusan dan integritas.

Kegiatan dilanjutkan dengan narasumber yang kedua dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung dengan mengambil tema Kekayaan Intelektual Komunal dan Warisan Budaya Tak Benda. Indra Jamal Nur menekankan tentang pengertian Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dimana berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan atau penciptaan Kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya tak benda setelah melalui proses penetapan budaya tak benda.

Narasumber Terakhir, Meizano Ardhi Muhammad menjelaskan tentang peranan Sentra Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Hak Cipta di Perguruan Tinggi. Meizano memberikan penjelasan tentang Potensi Kekayaan Intelektual Universitas Lampung dan juga peran Sentra HAKI LPPM Unila seperti bimbingan Teknik Drafting Paten, pendaftaran paten, pengurusan proses paten, pendaftaran hak cipta, pendaftaran merek, pendaftaran desain industri dan lain-lain.

Acara ini disambut dengan antusias dari para peserta, dimana para peserta yang hadir menanyakan permasalahan yang dihadapi. •



Daulat P Silitonga menjelaskan terkait dengan Kekayaan Intelektual Komunal



Meizano Ardhi Muhammad menjelaskan tentang peranan Sentra Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Hak Cipta di Perguruan Tinggi.



Sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber



Kanwil Lampung Gelar Optimalisasi Peran Pokmas Lipas Serta Peningkatan Kompetensi Petugas Pemasarakatan Tahun 2021

Kamis (27/05), Bertempat di Ballroom Golden Tulip Bandar Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menggelar kegiatan Optimalisasi Peran Pokmas Lipas (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan) Serta Peningkatan Kompetensi Petugas Pemasarakatan



Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasarakatan: Farid Junaedi, Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, & Teknologi Informasi: Mishbahuddin, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, & Keamanan: Yuniarto, Kepala Bagian Umum: Hadiyanto, Kepala Bidang Ham: Rina Anggraeny serta seluruh Kepala Satuan Kerja jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Peserta terdiri

dari berbagai elemen Forkopimda Provinsi Lampung, Akademisi dan Organisasi/Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan serta para Petugas Pemasarakatan.

Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan acara oleh Mishbahuddin selaku Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, & Teknologi Informasi yang dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Lampung yang diwakili oleh Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi.

Dalam sambutannya, Farid Junaedi menyampaikan bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan peran masyarakat dalam restorative justice dan Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan, sekaligus mewujudkan Resolusi Pemasarakatan menuju re-integrasi yang sehat maka perlu dibentuk



Kelompok Masyarakat Peduli Pemasaryakatan sebagai mitra kerja dan wadah pemberdayaan masyarakat guna mencapai tujuan sistem pemasaryakatan.

Saat ini tercatat ada 28 Kelompok Masyarakat Peduli Pemasaryakatan (Pokmas Lipas) yang sudah bekerjasama dengan Bapas di Wilayah Lampung. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan dan keterlibatan POKMAS LIPAS juga tak bisa kita lepaskan kaitannya dengan Sumber Daya Manusia pendukungnya yaitu para Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Kegiatan berlanjut dengan penyampaian materi terkait peningkatan kompetensi Petugas dalam pelaksanaan assessment bagi narapidanan maupun klien pemasaryakatan oleh Psikolog Ahli Madya: Rr. Ayu Sri Widyarani, Psikolog Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia Wilayah Jawa Timur: Sayekti Pribadiningtyas dan PK Ahli Madya Ditjen PAS: Suri Handayani melalui virtual meeting. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan para narasumber. •



***“Oleh karena itu, penting untuk membangun sinergi bersama mitra POKMAS LIPAS dalam penerapan semua program pembinaan dan integrasi sosial bagi WBP, Anak, dan klien Pemasaryakatan dalam rangka pemenuhan Pendidikan, Pekerjaan, Kebutuhan Kesehatan, Kebutuhan Mental Spiritual dan Pengawasan Program Bimbingan demi terwujudnya tujuan sistem pemasaryakatan yang sesuai dan tepat sasaran”
ujar Farid.***





Gerak Cepat Kanwil Lampung Tangani Covid-19 di Lapas dan Rutan

Gerak Cepat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dalam menangani Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas pada Lapas Kelas I Bandar Lampung yang nyatanya terinfeksi Covid-19

Mengambil langkah dengan Menempatkan WBP yang berstatus Reaktif pada Tes Rapid Antigen di kamar khusus isolasi poliklinik guna observasi intensif, diberikan multivitamin dan tambahan extrafooding serta melakukan koordinasi dengan Tim Satgas Covid-19 Kota Bandar Lampung dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Langkah-langkah tersebut membuka Talkshow Kepala Kantor Wilayah Lampung, Danan

Purnomo bersama dengan Metro TV Lampung. Kamis (27/05/2021)

Talkshow yang berlangsung dengan suasana santai di Ajib Kitchen, Bandar Lampung, mengangkat topik "Menekan Kluster Lapas" oleh Metro TV Lampung dengan Presenter, Delima Natalia Napitupulu menyoroti khusus tentang perkembangan kasus Covid-19 pada Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas di

Lapas Kelas I Bandar Lampung. Metro TV merespon reaksi masyarakat yang diharapkan dari Talkshow bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung ini dapat memberikan informasi terkait dengan Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM Lampung khususnya Lapas Kelas I Bandar Lampung.

Dalam Talkshow, Danan menyampaikan tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 yang berpedoman pada Permenkumham RI No.32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi WBP dan Anak.

Di akhir Talkshow, Danan berharap penyebaran Covid-19 dapat segera diatasi dengan melakukan tes Rapid Antigen secara berkala, menghentikan sementara penerimaan WBP, serta terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. •



Danan menyampaikan tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 yang berpedoman pada Permenkumham RI No.32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Bagi WBP dan Anak.



Talkshow yang berlangsung di Ajib Kitchen, Bandar Lampung,



Talkshow dipandu Presenter, Delima Natalia Napitupulu



Danan menjelaskan pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19

SAYA SUDAH

DIVAKSIN

Sukseskan Vaksinasi

VAKSIN
AMAN
DAN
HALAL

TERAPKAN 3M

• JAGA JARAK • MENCUCI TANG

126 Pegawai Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Bertempat di RSUD Dr. Abdul Moeloek, Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Vaksinasi Covid-19 dosis kedua pada Senin (03/05/2021). Pemberian vaksin dosis kedua ini diberikan menyusul setelah dilaksanakannya Vaksinasi Covid-19 dosis pertama yang telah diterima oleh pegawai Kanwil Kemenkumham Lampung pada 5 April lalu.



Pegawai Kanwil Kemenkumham Lampung mengikuti Vaksinasi Covid-19 dosis kedua di RSUD Dr. Abdul Moeloek



“Tetap jaga prokes 5M, karena meskipun sudah divaksin Covid-19 bukan berarti tidak akan terinfeksi lagi,” ujar Nathalia.

Sebanyak 126 pegawai Kanwil Kemenkumham Lampung mengikuti vaksinasi tahap kedua ini. Peserta vaksin dosis kedua ini diharuskan membawa kartu Vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan fotocopy KTP untuk proses registrasi.

Sebelum dilakukan vaksinasi, petugas akan memeriksa suhu dan tensi darah serta menanyakan apakah peserta vaksin dalam kondisi prima. Petugas juga menanyakan apakah ada keluhan dari peserta setelah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama. Setelah dilakukan vaksinasi peserta akan mendapat Kartu Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua oleh petugas serta mendapat sertifikat yang dikirimkan melalui SMS.

Dihubungi secara terpisah Dokter Madya Kanwil Kemenkumham Lampung, Nathalia Christina Simanungkalit berpesan kepada pegawai yang telah melaksanakan Vaksinasi Covid-19 dosis kedua ini agar tetap menjaga protokol Kesehatan 5 M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

“Tetap jaga prokes 5M, karena meskipun sudah divaksin Covid-19 bukan berarti tidak akan terinfeksi lagi,” ujar Nathalia.

“Namun bila sudah divaksin setidaknya jika terinfeksi Covid-19 gejalanya lebih ringan dan dapat mengurangi angka kematian karena Covid-19,” pungkas Nathalia.



Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis kedua



Petugas memeriksa suhu dan tensi darah serta menanyakan apakah peserta vaksin dalam kondisi prima.



Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis kedua





Kanwil Lampung Ikuti Pembukaan Konferensi Ilmiah Internasional Hukum dan Hak Asasi Manusia Secara Virtual

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengikuti pembukaan Konferensi Ilmiah Internasional Hukum dan Hak Asasi Manusia secara virtual pada hari ini, Senin (03/05/21) di Ruang Akuntabilitas.



Hadir sebagai perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan didampingi oleh Kepala Bidang HAM, Rina Anggraeny. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Ma-

nesia. Rangkaian kegiatan Konferensi Ilmiah Internasional ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 3-6 Mei 2021 dengan tema "Restructuring Law and Human Rights in New-Normal Society".

Dalam kesempatan ini Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H La-

oly menyampaikan apresiasinya kepada peserta dan panitia. Sebanyak 10.903 peserta telah terdaftar untuk turut andil dalam kegiatan virtual ini. Serta menerima 306 abstrak dari para akademisi terkemuka, dengan 141 dinyatakan lolos sebagai pemakalah. Sembilan dari para pemakalah ini hadir

dari tujuh negara yakni Australia, Brunei, India, Malaysia, Polandia, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Yasonna H. Laoly juga menyampaikan bahwa Acara ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk membuka diskusi dan debat dalam isu-isu hukum dan hak asasi manusia, di tengah pemangku kebijakan nasional dan internasional. •



Yasonna H. Laoly juga menyampaikan bahwa Acara ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk membuka diskusi dan debat dalam isu-isu hukum dan hak asasi manusia, di tengah pemangku kebijakan nasional dan internasional.



Yasonna menjelaskan jika berbagai tantangan dan perubahan membuat sistem hukum harus beradaptasi



Menkumham berikan cinderamata kepada Menristek, Prof. Bambang Brodjonegoro

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD. Dalam sambutannya, Mohammad Mahfud MD menyampaikan bahwa tema Konferensi Ilmiah Internasional yang diusung kali ini sesuai dengan kondisi dunia saat ini yang sedang berjuang melawan pandemi covid-19. Banyak kasus hukum yang terjadi selama masa pandemi ini yang berakhir dengan ketidakadilan, pada tema ini kasus yang diangkat adalah seputar perkembangan sosial ekonomi, penguatan hukum, sistem kesehatan masyarakat, dan identitas Kebudayaan.

Dengan adanya Konferensi Ilmiah Internasional ini diharapkan dapat memperluas jejaring dan kolaborasi antar ahli hukum, akademisi, pembuat kebijakan dan para praktisi, untuk bekerja bersama dan berkontribusi terhadap upaya nasional dalam menghadapi dampak dari pandemi. •





Kanwil Lampung Serahkan Sertifikat Merek Kepada Dekranasda Provinsi Lampung



Bertempat di Dekranasda Pemerintah Provinsi Lampung hari ini Rabu (05/05/21), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung serahkan Sertifikat Merek Tapis kepada Ketua Dekranasda Provinsi Lampung.



Nur Ichwan menyampaikan bahwa selain merek, ada hak cipta juga yang dapat didaftarkan berkaitan dengan motif dari Tapis. Kanwil Kemenkumham Lampung juga berkomitmen untuk bekerja dengan cepat dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait Kekayaan Intelektual.

Kegiatan penyerahan Sertifikat Merek Tapis Lampung ini di sambut baik oleh Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal bersama dengan jajarannya. Hadir sebagai perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar Tua bersama dengan Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Adil Jaya Negara.

Dalam kesempatan ini, Ketua Dekranasda menyampaikan apresiasi atas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang cepat dalam pelayanan pendaftaran Merek yang dalam hal ini Tapis Lampung. Dengan adanya sertifikat ini, diharapkan dapat melindungi Kekayaan Intelektual dan Warisan Budaya Daerah sehingga dapat menjadi ciri khas atau identitas daerah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga menyampaikan bahwa selain merek, ada hak cipta juga yang dapat didaftarkan berkaitan dengan motif dari Tapis. Kanwil Kemenkumham Lampung juga berkomitmen untuk bekerja dengan cepat dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait Kekayaan Intelektual.



Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal menerima kunjungan Tim Kemenkumham Lampung



Nur Ichwan menyerahkan Sertifikat Merek Tapis kepada Ketua Dekranasda Provinsi Lampung





Kanwil Lampung Ikuti Bimtek Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung ikuti Bimbingan Teknis (bimtek) Pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM secara virtual melalui aplikasi Zoom di ruang Akuntabilitas pada hari ini, Kamis (06/05/21).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan didampingi oleh Kepala Bidang HAM, Rina Anggrany dan Kepala Sub Bidang HAM, Ferie Irza Irawan. Kegiatan yang

diselenggarakan oleh Direktorat Jendral HAM ini dibuka oleh Direktur Jendral HAM. Dalam sambutannya, Direktur Jendral HAM, Muallimin Abdi menyampaikan bahwa bimbingan teknis pelaksanaan pelaporan Aksi HAM ini dirasa perlu mengingat masih banyak daerah yang data pelaporannya kurang lengkap sehingga menghambat koordinasi dengan pusat. Pada kegiatan ini hadir selaku narasumber, Slamet Soedarsono Deputi bidang Politik, hukum, pertahanan dan keamanan Kementerian PPN/Bappenas yang memberikan pemaparan mengenai pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) sebagai Prioritas Nasional tahun anggaran 2021. Hadir pula sebagai narasumber, Sri Purwaningsih Sekretaris Direktorat jendral bina pembangunan daerah kementerian dalam negeri yang menjelaskan teknis penyusunan Pelaporan Aksi HAM.

Slamet menjelaskan bahwa perkembangan RANHAM saat ini telah memasuki generasi ke-5 dengan fokus kepada pendekatan kelompok sasaran berdasarkan isu strategis dan sasaran strategis yang berbasis pada data capaian evaluasi RANHAM. Berdasarkan data evaluasi partisipasi pelaporan Aksi HAM pada tahun 2020 masih terdapat 91 pemerintah kabupaten/kota/daerah yang belum melakukan pelaporan. Sri Purwaningsih menambahkan bahwa Pelaporan Aksi HAM merupakan Pelaporan Target Caturwulan oleh K/I/D melalui Sistem Informasi secara realtime yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan Pelaporan Tahunan.

Dengan adanya kegiatan bimtek ini, diharapkan seluruh daerah melakukan pelaporan Aksi HAM tahun 2021 dengan tepat waktu sehingga pelaksanaan Aksi HAM dapat termonitor dengan baik. •



Hadir Lengkap, Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Apel Pagi Serentak di Lingkungan Kemenkumham RI

Bertempat di Aula, Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Apel Pagi Pegawai Kemenkumham serentak secara virtual pada Senin (10/05/2021). Dari Kanwil Kemenkumham Lampung turut hadir Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo didampingi oleh para Kepala Divisi beserta seluruh Pejabat Administrator. Adapun seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Lampung mengikuti jalannya apel secara virtual dari ruang kerja masing-masing.

Apel pagi dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto. Sebelum memulai apel, Andap memeriksa kembali kehadiran dari seluruh peserta apel. Andap mengawali arahnya dengan mengucapkan selamat menjalankan Ibadah Puasa serta semoga dapat menjalankannya secara penuh sampai akhir.

Selain itu Andap juga menyampaikan kondisi Covid terkini serta berpesan agar dapat belajar dari kasus Covid India meningkat karena tempat pertemuan yang dibuka untuk umum dan perayaan Kumbh Mela. Untuk itu kita dihimbau agar tidak lengah dalam penanganan pandemi Covid-19 ini salah satunya dengan tidak mudik ataupun melakukan perjalanan keluar daerah. Andap juga menyampaikan terkait jad-

wal libur Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang diawali dengan cuti bersama pada tanggal 12 Mei, libur Hari Raya Idul Fitri tanggal 13-14 Mei dan libur Hari Sabtu & Minggu tanggal 15-16 Mei. Sedangkan pada tanggal 17 Mei 2021 seluruh pegawai di lingkungan Kemenkumham RI wajib masuk.

Tak luput Andap menekankan terkait kesiapan pengamanan di seluruh jajaran Kemenkumham RI pada saat libur lebaran. Memeriksa kesiapan pengamanan, khususnya petugas pengamanan yang bekerja pada hari libur (Rabu-Minggu) serta mengantisipasi kejadian kontingensi atau tidak terprediksi.

"Tolong dipastikan keamanan lingkungan kerja, dengan cara cek secara langsung di lapangan," tuturnya.

Larangan ASN selama Ramadhan dan Libur Lebaran juga disampaikan oleh Andap. Larangan tersebut meliputi tidak mengadakan buka bersama, tidak boleh melakukan open house, tidak boleh mudik/keluar daerah serta tidak diperbolehkan mengajukan cuti pada tanggal 6-17 Mei 2021. Apabila larangan tersebut dilanggar maka dapat dikenai sanksi disiplin.

Andap menutup arahnya dengan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. "Taqoballahu minna wa minkum Taqobal ya karim, minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin," pungkas Andap. •



Seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Apel Pagi serentak secara virtual



Apel pagi dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Andap Budhi Revianto

”
Andap menekankan terkait kesiapan pengamanan di seluruh jajaran Kemenkumham RI pada saat libur lebaran. Memeriksa kesiapan pengamanan, khususnya petugas pengamanan yang bekerja pada hari libur (Rabu-Minggu) serta mengantisipasi kejadian kontingensi atau tidak terprediksi.





Kakanwil dan Bupati Lampung Tengah Jadi Saksi Penandatanganan PKS di Lapas Gunung Sugih

Di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih, Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo bersama dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi, Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara dan Kepala Bagian Umum, Hadiyanto menghadiri kegiatan dalam rangka Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih dengan Kementerian Agama Lampung Tengah, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lampung Tengah, Pondok Pesantren Darul Huda, Panti Asuhan Yatim Piatu Koga, dan TPPA Terubus Iman As-Salamah. Senin (10/05/2021)



Kakanwil mengucapkan terimakasih atas dukungan dari FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Tengah serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan Perjanjian Kerjasama

Kegiatan ini turut mengundang Bupati Lampung Tengah, Kepala DPRD Lampung Tengah, Kepala Polres Lampung Tengah, Dandim 0411, Danyon B Sat Brimobda Lampung Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Ketua Pengadilan Negeri Lampung Tengah, dan Ketua Pengadilan Agama Lampung Tengah.

Acara dimulai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh Kepala Lembaga Masyarakat Kelas IIB Gunung Sugih bersama dengan Ketua Kementerian Agama Lampung Tengah, Ketua MUI Lampung Tengah, Pimpinan Ponpes Darul Huda, Kepala Panti Asuhan Yatim Piatu Koga dan Kepala TPA Terubus Iman As-Salamah yang dilakukan secara bergantian serta disaksikan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dan Bupati Lampung Tengah.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah memberikan sambutan dan ucapan terimakasih atas dukungan dari FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Tengah serta semua pihak yang telah mendukung kegiatan Perjanjian Kerjasama. Danan berharap kegiatan ini dapat menjadikan sarana pembinaan rohani teradap Warga Binaan Masyarakat di Lingkungan Lapas Gunung Sugih. Tak lupa danan memberikan pesan kepada seluruh jajaran di Lapas Gunung

Sugih untuk terus menjalin sinergitas kepada instansi maupun stakeholder yang dapat membangun keterampilan dan pembinaan mental di Lapas Gunung Sugih.

Acara berlanjut dengan sambutan dari Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad yang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan terus mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan di Lapas Gunung Sugih. Musa Ahmad juga menilai kegiatan pembinaan rohani ini bisa menjadikan bekal kepada WBP agar ketika telah selesai menjalankan masa pidana, WBP mampu bersosialisasi, menyatu serta bermanfaat di masyarakat.

Selanjutnya acara ditutup dengan doa bersama dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama dengan menerapkan Prokes. •

Danan berharap kegiatan ini dapat menjadikan sarana pembinaan rohani teradap Warga Binaan Masyarakat di Lingkungan Lapas Gunung Sugih. Tak lupa danan memberikan pesan kepada seluruh jajaran di Lapas Gunung Sugih untuk terus menjalin sinergitas kepada instansi maupun stakeholder yang dapat membangun keterampilan dan pembinaan mental di Lapas Gunung Sugih.



Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menyampaikan bahwa Pemkab Lampung Tengah akan terus mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan di Lapas Gunung Sugih





Pasca Lebaran, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Apel Pagi Bersama Menteri Hukum dan HAM RI

Bertempat di Aula, Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Apel Pagi bersama Menteri Hukum dan HAM RI pada Senin, (17/05/2021) secara virtual. Dari Kanwil Kemenkumham Lampung turut hadir Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo didampingi oleh para Kepala Divisi beserta seluruh Pejabat Administrator. Adapun seluruh Kepala UPT mengikuti jalannya acara dari tempat kerja masing-masing.



Apel dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Yasonna mengawali amanatnya dengan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Mohon Maaf Lahir dan Batin bagi seluruh umat Muslim di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta selamat memperingati hari Kenaikan Isa Almasih bagi umat Kristiani.

"Pada tahun 2021 ini Hari Raya Idul Fitri bertepatan dengan Hari Kenaikan Isa Almasih, dan inilah, salah satu contoh wujud Bhinneka Tunggal Ika, potret tenggang rasa, dan persatuan Bangsa Indonesia seutuhnya," ujar Yasonna.

Yasonna mengingatkan jika perang melawan Covid-19 belum usai. Untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19, harus ada gotong royong dan kepedulian antara Pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat, yaitu dengan mematuhi protokol Kesehatan. Pencegahan dan penanganan Covid-19 untuk masing-masing jajaran juga disampaikan oleh Yasonna.

Menjelang semester II tahun 2021, Yasonna mengingatkan kepada seluruh jajaran agar dapat melakukan percepatan dalam pelaksanaan target kinerja dan anggaran.



Kanwil Kemenkumham Lampung turut hadir Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo didampingi oleh para Kepala Divisi beserta seluruh Pejabat Administrator.



Kegiatan ditutup dengan silaturahmi secara virtual antara Menkumham, Wamenkumham dengan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.



"Pandemi COVID-19 jangan menjadi pembenar untuk keterbatasan berkinerja. Kondisi ini sudah kita lalui sejak tahun 2020, dan saya yakin Saudara sudah dapat menyesuaikan untuk kembali berkinerja tinggi" imbuhnya.

"Pandemi COVID-19 jangan menjadi pembenar untuk keterbatasan berkinerja. Kondisi ini sudah kita lalui sejak tahun 2020, dan saya yakin Saudara sudah dapat menyesuaikan untuk kembali berkinerja tinggi" imbuhnya.

Menutup amanatnya Yasonna berpesan agar seluruh jajaran dapat melaksanakan pelayanan prima. "Pelayanan prima, penyerapan anggaran, penyelesaian temuan pemeriksaan keuangan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai-nilai indeks kinerja, serta predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanai (WBK/WBBM) harus menjadi tujuan yang harus kita raih bersama," pungkas Yasonna.

Kegiatan ditutup dengan silaturahmi secara virtual antara Menkumham, Wamenkumham dengan seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. •



Kanwil Lampung Gelar Evaluasi Kegiatan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Selasa (18/05/21), bertempat di ruang Legal Drafter Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM gelar rapat evaluasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan; Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ignatius Mangantar Tua; Kepala Bidang Hukum, Rugun Tresia Oktavianti; Kepala Bidang HAM, Rina Anggraeny; didampingi oleh kasubag masing-masing bidang.

Kegiatan ini diawali dengan laporan penyerapan dan rencana kerja dari masing-masing bidang. Disampaikan oleh Kepala bidang HAM, realisasi pada bagian pemajuan HAM hingga bulan Mei ini mencapai 13,87% dan bagian pengkajian HAM penyerapan mencapai 11,8%. Rendahnya penyerapan dipengaruhi oleh masih adanya pandemi, keterbatasan SDM, dan adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan dengan bagian lain.

Laporan juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum mengenai penyerapan bagian Kekayaan Intelektual (KI) mencapai 32,98% sedangkan bagian Administrasi Hukum Umum (AHU) sebesar 19,20%. Penyerapan ini merupakan realisasi dari kegiatan diseminasi, Koordinasi peran kanwil dalam kemudahan pengusaha, Implementasi kerjasama intelektual dengan Pemerintah Daerah dan Pendidikan Tinggi, serta Pencegahan Pelanggaran KI.

Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sehingga dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih PASTI kepada masyarakat.

Kepala Bidang Hukum juga melaporkan penyerapan pada bagian peraturan perundang-undangan (PP) mencapai 45,41% dan bagian BPHN sebesar 30,01% dengan kegiatan yang dilakukan yaitu Harmonisasi Perda untuk bagian PP dan Analisa serta Evaluasi pada bagian BPHN. •



Kakanwil Lantik 7 Pejabat Administrasi dan 7 Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Perancang Perundang-undangan Muda

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan serta Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda. Rabu (19/05/2021)

Di Aula Kantor Wilayah Lampung, Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK.2-610.KP.10.02 Tahun 2021 Tanggal 13 April 2021, Nomor: SEK.2-611.KP.10.02 Tahun 2021 Tanggal 13 April 2021, Nomor: SEK.2-624.KP.10.02 Tahun 2021 Tanggal 04 Mei 2021, Nomor: SEK.2-625.KP.10.02 Tahun 2021 Tanggal 04 Mei 2021, Nomor: SEK.2-626.KP.10.02 Tahun 2021 Tanggal 04 Mei 2021, Nomor: SEK.2-627.KP.10.02 Tahun 2021 Tanggal 04 Mei 2021, Nomor: SEK.2-628.KP.10.02 Tahun 2021 Tanggal 04 Mei 2021, Nomor: W.9-1864.KP.03.03 Tahun 2021 Tanggal 15 Mei 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Lampung.

7 Pejabat Administrasi yang dilantik, diantaranya:

1. Eko Iswanto Sebagai Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung;
2. Umar Hasbullah Sebagai Kepala Sub Seksi Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan;
3. Rendy Julianto Sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung;
4. Sugiyanto Sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Klen Anak pada Balai pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung;
5. Anwar Sebagai Kepala Urusan Tata Usaha pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung;



6. Faisal Islam Sebagai Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda;
7. Gerry Tri Aryadi Sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi.

Sedangkan 7 lainnya Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, diantaranya:

1. Brassica Oryza Sativa Jaya-singa Sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung;
2. Eliyani Sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung;
3. Herliana Husein Sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung;
4. Dewi Kartika Sari Sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung;
5. Priska Pestaria Natalia Sida-butar Sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung;
6. Dina Ismela Yunita Sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung;
7. Wahyu Sutanto Sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. •



Kanwil Kemenkumham Lampung Laksanakan Pembinaan Desa Sadar Hukum di Kabupaten Lampung Timur

Senin (31/05/2021) bertempat di Aula Kantor Bupati Lampung Timur, Tim Pembinaan Desa Sadar Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bekerjasama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan Pembinaan Desa Sadar Hukum. Kepala Bagian Hukum, Setda Kabupaten Lampung Timur, Sudarli mewakili Bupati Lampung Timur membuka kegiatan yang diikuti 24 Camat dan 4 Kelompok Sadar Hukum yang ada di Kabupaten Lampung Timur.

Tim Pembinaan Desa Sadar Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang terdiri dari para penyuluh hukum, antara lain Erwin Setiawan Yuniarto, Indrawati Imron, Mardhotillah dan Robi Awaludin memberikan materi tentang pro-

sedur penetapan pembentukan, pembinaan Desa/Kelurahan Binaan sampai menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pengisian kuesioner serta evaluasi desa sadar hukum.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat adalah dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan pada beberapa kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Petunjuk teknis pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor Phn.Hn.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Seiring dengan perkembangan kriteria desa/kelurahan sadar hukum mengalami perubahan yang diatur melalui Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Perubahan penilaian meliputi 4 (empat) dimensi yaitu dimensi informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dimensi akses regulasi dan demokrasi. Kegiatan diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang diikuti secara antusias oleh para peserta pembinaan desa sadar hukum Kabupaten Lampung Timur. •



Kanwil Lampung Gelar Pembinaan Kadarkum Kabupaten Lampung Tengah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung gelar Pembinaan Desa/ Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Senin (31/05/21). Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat.

Dalam kesempatan ini, sebagai perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Kepala Bidang Hukum, Run Pakhpahan; didampingi oleh Tim Penyuluh Hukum, Thomas Meitian; staff subbidang penyuluh Hukum Penyuluhan Hukum Bantuan Hukum, Rika Rizky; dan JDIH, Yemilia Sari berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah setempat untuk memfasilitasi kegiatan pembinaan secara langsung kepada Desa Sadar Hukum serta Kelompok Kadarkum.

Pembinaan Desa Sadar Hukum yang berlangsung di aula kelurahan simbarwaringin ini dibuka oleh Wanda Rusli selaku Camat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ditengah Pandemi Co-

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan terkait penetapan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta penyusunan kebijakan terkait sinergitas program oleh instansi terkait dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

vid-19. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan terkait penetapan dan pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum serta penyusunan kebijakan terkait sinergitas program oleh instansi terkait dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat. •



Kanwil Lampung Turut Berpartisipasi Pelopori Pembentukan Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Kemenkumham RI

Pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara menyebarkan program dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian antara pemerintah dan masyarakat. Proses komunikasi ini akan cepat membangun opini publik yang berdampak pada citra dan reputasi pemerintah. Humas pemerintah harus mampu memanfaatkan media sosial untuk meraih perhatian dan dukungan khalayak luas.

Humas Kementerian Hukum dan HAM wajib memberlakukan sistem jejaring komunikasi yang seimbang antara Humas Unit Utama dan Humas Kantor Wilayah melalui pembangunan infrastruktur komunikasi yang bagus. Infrastruktur tidak hanya dalam bentuk hardware dan software saja, tetapi juga pengaturan sistem komunikasi publik dan regulasi hukum yang bertujuan menciptakan lingkungan pembangunan sistem komunikasi dan literasi media.

Dilatarbelakangi hal tersebut, pada Kamis (27/05/21), bertempat di Aston Lake Resort & Convention Center, Bogor, Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung turut mengikuti Konsinyering Penyusunan Pedoman Media

Sosial yang diselenggarakan oleh Biro Humas, Hukum & Kerjasama, Sekretariat Jenderal, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam sambutannya Kepala Biro Humas, Hukum & Kerjasama, Heni Susila Wardoyo, menilai bahwa keberadaan media sosial di masa pandemi seperti saat ini sangat menunjang bagi instansi-instansi pemerintah untuk senantiasa berinovasi dalam berkinerja.

"di mana hubungan secara fisik kita dibatasi sehingga tidak alasan untuk kita mengurangi komunikasi di antara jajaran. melalui teknologi informasi inilah kemudian kita, dipacu, dipicu untuk selalu berkreasi". Ujar Heni.



**“Menyadari atas potensi kerawanan apabila tidak dikelola dengan baik maka kami dari Jaringan Biro Humas memandang penting adanya pedoman, supaya medsos ini tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif tetapi punya fungsi yang positif dalam rangka menarasikan kinerja kita.”
Ujar Heni.**

Menyadari akan potensi media sosial yang juga dapat memberikan dampak negatif terhadap organisasi apabila tidak dikelola dengan baik dan benar, Heni dan jajaran memandang perlu adanya suatu pedoman yang dapat dijadikan rujukan.

Kegiatan ini menghadirkan Wicaksono atau yang di jagat maya akrab disapa Ndro Kakung, seorang digital curator, content creator, dan advisor di bidang komunikasi. Ndro Kakung membagikan kiat-kiat tentang bagaimana mengelola media sosial pemerintah untuk meraih dan meningkatkan engagement rate atau tingkat keterlibatan, yang kini menjadi tolok ukur keberhasilan suatu media sosial di luar jumlah pengikut atau follower. Ndro Kakung juga memberikan strategi berkomunikasi di media sosial dengan mulai dari menentukan tujuan komunikasi, menentukan kanal komunikasi hingga menentukan sasaran audiens.

Kegiatan pembukaan konsinyering diakhiri dengan sharing session terkait pengelolaan kehumasan dari Kemendikbudristek, Kemenlu, Pemprov DKI dan Universitas Al-Azhar. •



Konten Kreator, Wicaksono membagikan kiat-kiat tentang bagaimana mengelola media sosial



Kegiatan pembukaan konsinyering diakhiri dengan sharing session terkait pengelolaan kehumasan



Kanwil Lampung Berikan Diseminasi Layanan AHU Mengenai Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Oleh Korporasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung menggelar Kegiatan Diseminasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) mengenai Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) oleh Korporasi. Kegiatan yang digelar di Ballroom Hotel Radisson Lampung mengundang 3 (tiga) narasumber dan dihadiri oleh peserta dari para pemilik manfaat kepada korporasi di Wilayah Lampung.

Ignatius Tua Mangatar S membuka dengan menyampaikan Laporan Ketua Panitia Kegiatan ini. Acara secara resmi dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan yang sekaligus mewakili Kepala Kantor Wilayah. Nur Ichwan menjelaskan bahwa Kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran korporasi untuk melakukan pendaftaran khususnya di Provinsi Lampung. Kedepan diharapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dapat diterapkan secara efektif oleh seluruh korporasi yang ada di Provinsi Lampung dan jumlah korporasi di Provinsi Lampung yang melaporkan Pemilik manfaatnya akan semakin meningkat sehingga investor terhadap korporasi yang ada di Provinsi Lampung juga ikut

meningkat. Acara yang dimoderatori oleh JFT Penyuluh Hukum Madya, M. Zuhri ini diawali dengan pemaparan pertama dari Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU, Sri Yuliani melalui virtual. Sri menjelaskan bahwa Beneficial Owner di Indonesia diterapkan dalam rangka upaya untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. "Untuk itu diperlukan Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)" Ujarnya.

Selanjutnya narasumber kedua, Zul April selaku Ketua Pengwil INI Lampung dan juga selaku Wakil Ketua MKNW Provinsi Lampung memberikan pemaparan tentang bagaimana Peran Notaris Dalam Pendaftaran Pemilik

Manfaat (Beneficial Ownership) dari Korporasi Dalam Rangka Peningkatan Investasi Di Provinsi Lampung. Zul menjelaskan bentuk-bentuk Korporasi yaitu Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma, Perkumpulan, Yayasan, serta Koperasi. Zul juga meminta dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris juga berdasarkan permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), yang meliputi: Identifikasi, Verifikasi, dan Pemantauan transaksi Pengguna Jasa.

Pemateri Terakhir, Laila Yunara selaku Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Ditjen AHU membahas tentang Kebijakan Terkait Pelaporan Pemilik Manfaat pada Korporasi. Dalam melakukan pengawasan, Laila menjelaskan bahwa Ditjen AHU berkoordinasi dengan Instansi Terkait sesuai dengan kewenangannya serta Menteri Hukum dan HAM RI dapat membentuk Tim dalam melakukan Pengawasan.

Pelaksanaan Pengawasan sendiri terbagi menjadi Pengawasan Off-Site dan Pengawasan On-Site yang menghasilkan Isian data dan Informasi Korporasi, Temuan Pengawasan berdasarkan pemeriksaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, dan Rekomendasi hasil Pengawasan.

Di akhir acara dibuka 2 (dua) termin dengan masing-masing 3 (tiga) penanya yang disambut antusias dari para peserta. Salah satunya dari PT. Wahana Semesta Lampung, Notaris Lampung Tengah, dan juga Perwakilan Persatuan Konsultan Indonesia. •



Pemukulan Gong oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menjadi tanda pembukaan kegiatan



Zul April selaku Ketua Pengwil INI Lampung dan juga selaku Wakil Ketua MKNW Provinsi Lampung memberikan pemaparan tentang Peran Notaris Dalam Pendaftaran Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dari Korporasi



Sesi diskusi menjadi penutup Kegiatan Diseminasi Layanan AHU Mengenai Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Oleh Korporasi

PROTOKOL KESEHATAN NEW NORMAL

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020, dalam rangka mencegah peyebaran COVID-19.

JAGA JARAK

Tetap memperhatikan jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 meter saat berhadapan dengan orang lain.



GUNAKAN MASKER

Saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja. HINDARI tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.

CUCI TANGAN

Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer.



AYO! PAKAI MASKER

KENAKAN MASKER ANDA DEMI KEBAIKAN KITA BERSAMA

CEGAH PENYEBARAN COVID-19 DIMULAI DARI DIRI SENDIRI



DANAN PURNOMO
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM
LAMPUNG

Gunakan smartphone anda untuk memindai (scan) QR-Code berikut*



Atau klik tautan (link) di bawah
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
<http://bit.ly/tigaaskumhamlampung>

**BANTU KAMI MEMBENAHAI LAYANAN
DENGAN BERPARTISIPASI DALAM SURVEI
BERIKUT**

HASIL SURVEI KUALITAS PELAYANAN
PERIODE MARET 2021
DENGAN 113 RESPONDEN



Gunakan smartphone anda untuk memindai (scan) QR-Code berikut*



Atau klik tautan (link) di bawah
SURVEI KUALITAS PELAYANAN
<https://survei.balitbangham.go.id/ly/ROCP7k6H>